



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 014/ORI-SE/IX/2017

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Ombudsman RI, mengundang Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi Jabatan tersebut, dengan ketentuan:

A. Jabatan yang akan diisi

1. JPT Madya: Sekretaris Jenderal Ombudsman RI (Eselon I/a), yang membawahkan:
 - Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama;
 - Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan; dan
 - Biro Umum
2. JPT Pratama:
 - a. Kepala Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan (Eselon IIa), yang membawahkan:
 - Bagian Hukum;
 - Bagian Humas dan Protokol;
 - Bagian Pelayanan Laporan (mengelola administrasi pengaduan masyarakat);
 - Bagian Sistem Informasi dan Teknologi Informasi.
 - b. Kepala Biro Umum (Eselon IIa), yang membawahkan:
 - Bagian Kepegawaian dan Ketatausahaan;
 - Bagian Keuangan; dan
 - Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

B. Persyaratan

1. JPT Madya
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. pangkat/golongan minimal Pembina Utama Muda (IV/c);
 - f. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - g. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 1 Desember 2017; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan sehat rohani dari rumah sakit pemerintah.

2. JPT Pratama

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. pangkat/golongan minimal Pembina Tingkat I (IVb);
- f. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- g. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 1 Desember 2017; dan
- h. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan sehat rohani dari rumah sakit pemerintah.

C. Pendaftaran

1. Pendaftaran dimulai tanggal 7 September 2017 s.d. tanggal 22 September 2017.
2. Berkas lamaran disampaikan melalui email **panseljpt2017@ombudsman.go.id** dan diterima paling lambat tanggal 22 September 2017 jam 20.00 WIB. Berkas lamaran di-*scan* (berwarna dengan format pdf) dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Surat lamaran dibuat sendiri dan ditandatangani oleh pelamar, serta bermeterai Rp6000,00;
 - b. Ijazah terakhir;
 - c. SK Kepangkatan dan Jabatan yang diduduki;
 - d. SPT tahun terakhir;
 - e. DP-3 untuk 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Daftar Riwayat Hidup (lengkap);
 - g. Pakta integritas yang telah ditandatangani;
 - h. Sertifikat Diklat Kepemimpinan terakhir;
 - i. Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 (format jpeg max 300kb);
 - j. Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - k. LHKPN untuk pelamar JPT Madya. LHKASN untuk pelamar JPT Pratama; dan
 - l. Keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah.

Dokumen asli wajib diperlihatkan saat pelaksanaan Ujian Makalah. Pelamar agar menuliskan subjek pada email sesuai jabatan yang dilamar dengan penulisan sebagai berikut:

JPT Madya – Nama Pelamar (untuk formasi Sekretaris Jenderal)

JPT ASIL – Nama Pelamar (untuk formasi Kepala Biro ASIL)

JPT Umum – Nama Pelamar (untuk formasi Kepala Biro Umum)

3. Lamaran yang akan diproses adalah lamaran yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
4. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
5. Perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui **www.ombudsman.go.id**. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar.
6. Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi, wajib menyerahkan hasil uji kesehatan jasmani dan rohani.